

PEMBANGUNAN KEKUATAN HANKAM DALAM ERA GLOBALISASI

Dani Purwanegara

Dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah derasnya arus perubahan cepat dan dinamika kehidupan antarbangsa, tetap menuntut adanya jaminan kepastian atas terpeliharanya rasa aman dan keamanan. Upaya untuk menjamin terpeliharanya rasa aman dan keamanan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat bersama dengan pemerintah. Namun demikian di pundak pemerintahlah tumpuan utama perencanaan dan pelaksanaannya, dan apabila ternyata gangguan terhadap jaminan rasa aman dan keamanan ini meningkat, maka tudingan kesalahan biasanya ditujukan kepada aparaturnya (baca aparaturnya pemerintah). Stabilitas keamanan meskipun diyakini bukan satusatunya kebutuhan umat manusia, namun setiap orang akan sependapat bahwa tanpa adanya rasa aman dan keamanan, mustahil ia dapat mengupayakan kesejahteraan dengan baik. Bukan hal yang luar biasa, manakala keamanan sudah terselenggara dengan baik, apabila jangka waktunya berlangsung relatif lama, maka stabilitas keamanan seolah tidak diperlukan lagi, sudah taken for granted.

Antara keamanan dan kesejahteraan terjalin hubungan *kausal holarkhie* yang sinergis. Artinya tingkat keamanan yang memadai akan menjamin kelancaran upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, sebaliknya tingkat kesejahteraan yang semakin baik akan menjamin tersedianya sumber daya yang cukup untuk menunjang kebutuhan pemba-

ngunan kekuatan Hankam. Dalam hal ini penyediaan sarana Hankam (*means*) baik dalam pengertian manusia yang dilengkapi sarana prasarana Hankam maupun sebaliknya sarana prasarana Hankam, yang

Lakma (Purn.) Dani Purwanegara, SIP,
M.M., Mantan Wadan Seskoal

diawaki secara memadai merupakan pangkal tolak perencanaan pembangunan kekuatan Hankam.

Pembangunan kekuatan Hankam adalah bagian integral dari pembangunan nasional dan bukan semata-mata tugas pemerintah. Pembangunan kekuatan Hankam melibatkan potensi dan partisipasi seluruh kekuatan bangsa. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kekuatan Hankam bukan melulu urusan militer akan tetapi melibatkan seluruh komponen pembangunan nasional. Oleh sebab itulah maka kaidah, prinsip dan kerangka kerja (*framework*) perencanaan pembangunan kekuatan Hankam seyogyanyalah diketahui, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen kekuatan bangsa. Bahkan saat ini arah pembangunan kekuatan Hankam tidak saja terbuka untuk seluruh warga negara akan tetapi terbuka untuk bangsa/negara lainnya.

Diterbitkannya "Buku Putih" atau "Buku Biru" pembangunan kekuatan Hankam dimaksudkan untuk menciptakan keterbukaan dan rasa saling percaya (*confidence building*) antar-bangsa-bangsa di dunia. Melalui "Buku Putih" negara lain (minimal negara tetangga) diyakinkan bahwa arah pembangunan kekuatan Hankam se-

buah negara tidak ditujukan untuk menyiapkan kekuatan masa depan (*future force*) yang dapat mengancam eksistensi negara lainnya. Melalui Buku Putih kita dapat mengetahui, bahwa pembangunan kekuatan Hankam adalah benar-benar diperhitungkan untuk menyediakan tingkat kekuatan yang dibutuhkan untuk memelihara keamanan dalam negeri semata, serta direncanakan berdasarkan perhitungan normatif minimalnya, sedangkan kebutuhan untuk pemeliharaan keamanan regional dan global ditempuh melalui kerja sama pengaturan keamanan bersama.

Secara teoritik kerangka kerja pembangunan kekuatan Hankam setiap negara relatif sama, apabila ada perbedaan maka perbedaan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh sistem nilai, kemampuan sumber daya penduduk serta kebutuhan negara bersangkutan. Oleh sebab itu meskipun kerangka kerja pembangunan kekuatan Hankam secara teoritik adalah sama, namun terdapat postulat yang dianut yaitu "tak ada satu negara pun yang mempunyai Postur Hankamneg 'sama persis' dengan postur Hankam negara lain".

Agar setiap orang mempunyai kephahaman yang memadai dalam perencanaan pemba-

ngunan kekuatan Hankam, di bawah ini akan disajikan prinsip dan kaidah umum perencanaan tersebut, dengan harapan setiap pihak mengetahui, memahami, mengimplementasikan bahkan mengembangkan kerangka kerja pembangunan kekuatan Hankam tersebut, terutama apabila disadari bahwa sumber daya yang terbatas harus dapat dimanfaatkan setinggi-tingginya untuk menunjang kepentingan Hankam. Dikaitkan dengan dinamika perubahan yang tengah melanda umat manusia saat ini yaitu "globalisasi", apakah pembangunan kuat Hankam juga mengalami perubahan mendasar. Di bawah ini akan disajikan logika formal, interelasi dan interdependensi antara pembangunan kekuatan Hankam dan globalisasi.

Terminologi

Guna mencegah timbulnya diskusi yang tak berujung (*contradicto in terminis*) yang biasanya muncul dari pandangan, interpretasi dan persepsi dari sebuah kosa kata, ada baiknya disepakati terlebih dahulu terminologi di bawah ini:

1. Pembangunan adalah serangkaian upaya untuk memelihara, memantapkan, melanjutkan, memperluas segala sesuatu yang telah ada dan atau mem-

bentuk sama sekali baru terhadap segala sesuatu yang belum ada, berdasarkan sebuah rencana yang disusun secara konseptual, kontekstual, komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten, kontinyu, konsekuen serta konkret.

2. Kekuatan Hankam adalah wujud komprehensif dari seluruh potensi dan kekuatan nasional meliputi sumber daya manusia (militer dan non militer), sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana, wilayah negara dan Iptek yang dirancang (*design*), diorganisasikan (*organize*), dilengkapi (*equip*), dilatih (*exercise*), digunakan (*assign*), dipelihara dan didukung (*sustain & support*) agar mampu melaksanakan tugasnya sesuai tujuan yang ditetapkan.

3. Globalisasi adalah proses tata hubungan antarentitas (individu, masyarakat, bangsa) yang menggambarkan dinamika dan kesementaraan (transiensi) dalam dimensi ruang yang bersifat kesejagatan, dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam yang dimotori oleh revolusi Iptek serta menggunakan *platform*, komunikasi dan transportasi, dalam arti yang seluas-luasnya. Gencarnya arus globalisasi telah membentuk hubungan antarruang (global, regional, nasional dan lokal) menjadi semakin menyatu dalam arti bah-

wa antarruang hidup tersebut telah terjadi hubungan saling mempengaruhi, langsung (*direct*), terbuka dan nyaris tanpa hambatan serta dapat menembus batas negara bahkan batas rumah tangga.

Tinjauan Teoritik Perencanaan Kekuatan

Mengalir dari terminologi pembangunan di atas, maka makna pembangunan kekuatan Hankam, tidak melulu menambah kekuatan baik dalam arti kualitas maupun kuantitas. Pembangunan kekuatan Hankam dipandang dari aspek manajerial meliputi spektrum yang luas mulai dari inventarisasi, pengkajian, perencanaan, pemeliharaan, pembelian, pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penugasan, pemberian dukungan sampai dengan penghapusan tenaga manusia alat peralatan, sistem dan metode serta logistik yang berkait erat dengan kepentingan Hankam. Dalam pengertian yang amat sederhana pembangunan kekuatan Hankam menyangkut "pemeliharaan" dan atau "penambahan" kekuatan sendiri dan kawan.

Negara lain pada umumnya, mendiskripsikan kawan dalam arti aliansi/pakta (Bangsa Indonesia selama menganut politik bebas dan aktif, belum dan tidak

akan berniat untuk masuk ke dalam aliansi atau pakta). Berdasarkan logika di atas negara Barat lebih cocok menggunakan "perencanaan kekuatan (*force planning*) ketimbang istilah "pembangunan kekuatan (*force development*)". Mengingat perencanaan kekuatan bersifat rumit (*difficulties*) maka para perencana dapat memilih salah satu atau gabungan lebih dari dua pilihan seperti tersebut di bawah ini:

1. Pendekatan *top down* (berat atas), menurut pendekatan ini maka pihak pemegang keputusan (*top manager*) lebih dominan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan dibandingkan aspirasi, kemampuan dan kebutuhan satuan tingkat bawah. Pendekatan ini biasanya mewarnai perencanaan jangka panjang (10-30 tahun ke depan) oleh sebab itu idealisme kualitatif lebih menonjol ketimbang realitas.

2. Pendekatan *bottom up* (berat bawah), menurut pendekatan ini maka kemampuan dan kebutuhan satuan bawah lebih dominan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan ini biasanya diterapkan pada perencanaan jangka pendek (1-2 tahun ke depan) oleh sebab itu unsur realitas dan prioritas amat mengedepan.

3. Pendekatan ancaman (*threat*)

menurut pendekatan ini, analisis kemungkinan/ perkiraan ancaman dan kebutuhan kemampuan untuk menanggulangi ancaman (*net assessment*) lebih dominan. Karena kebutuhan kemampuan menjadi faktor utama untuk menanggulangi ancaman maka faktor biaya menjadi prioritas bahkan dapat mengalahkan prioritas biaya sektor lainnya. Pendekatan ini sering menimbulkan kontroversi antara: (a) perencana yang terlampaui optimistik (memperkirakan ancaman, menghitung kebutuhan kemampuan dan menghitung biaya terlampaui rendah), (b) perencana yang terlampaui pesimistik (memperkirakan ancaman, menghitung kebutuhan kemampuan dan menghitung biaya terlampaui tinggi), (c) perencana yang wajar (memperkirakan ancaman, kebutuhan kemampuan dan anggaran logik, realistik dan mengedepankan faktor empirik/ pengalaman).

4. Pendekatan *hedging* (memagari) menurut pendekatan ini maka perencana kekuatan lebih mengedepankan faktor ketidakpastian (*uncertainty*) oleh sebab itu perkiraan kebutuhan kemampuan dan kebutuhan anggaran fleksibilitasnya tinggi, namun tentu saja pendekatan ini hanya cocok untuk negara yang "kaya".

5. Pendekatan *mission* (tugas) menurut pendekatan ini maka

perencana kekuatan menetapkan kebutuhan kemampuan dan anggaran pembangunannya dari perhitungan penjabaran tugas (*task*) dan tujuan (*objective*) berdasarkan *mission* yang dibebankan kepada satuannya. Pendekatan ini biasanya menghasilkan tuntutan yang terlampaui ideal, optimistik dalam penyediaan anggaran sehingga kurang memperhatikan segi realita serta hanya cocok untuk negara yang relatif kaya.

6. Pendekatan teknologi, menurut pendekatan ini maka perencana kekuatan menyusun rencana pembangunannya berdasarkan kemampuan penguasaan teknologi para personil Hankam, kemampuan industri strategis nasional serta kesediaan dari negara pemasok untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat utama dan sistem senjata (Alut-Sista). Semakin tinggi teknologi yang dikuasai dan dituntut semakin mahal peralatan yang dibangun, semakin tinggi mobilitas, daya gempur dan akurasi namun semakin sedikit pengawakannya.

7. Pendekatan *budget* (anggaran pembangunan), menurut pendekatan ini maka perencana kekuatan amat memperhatikan keterbatasan anggaran yang dapat disediakan pemerintah, oleh sebab itu seberapa besar anggaran tersebut dapat memenuhi

tuntutan kebutuhan kemampuan serta seberapa besar risiko yang harus dihadapi karena sebagian (besar) kemampuan, yang dituntut tidak dapat dibangun. Dalam prakteknya perkiraan risiko dapat ditekan lebih kecil bila didukung tingkat profesionalisme personal.

8. Pendekatan skenario, menurut pendekatan ini perencana kekuatan menghitung kebutuhan kemampuan dan kebutuhan anggarannya berdasarkan tahapan pelibatan kekuatan, ditinjau dari sasaran, ruang dan waktu. Skenario dibuat selogik mungkin, bagaimana kekuatan yang akan dibangun dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategik, menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendalanya (*SWOT analisis*) dari pihak-pihak yang berhadapan yaitu antara kesatuan sendiri dan pihak pengancam yang diskenariokan. Pendekatan skenario biasanya ditempuh untuk menggantikan pendekatan ancaman yang menghasilkan analisis ancaman mendekati nol (ancaman kecil sekali).

9. Pendekatan *comprehensive* (menyeluruh), menurut pendekatan ini perencana kekuatan menggabungkan dua atau lebih pendekatan di atas. Faktor dominan diperhitungkan secara mendalam lalu dari perhitungan-perhitungan tersebut disimpulkan

seberapa besar kemampuan yang dituntut, berapa anggaran yang diperlukan, serta bagaimana membangunnya. Pendekatan komprehensif merupakan pendekatan yang holistik dalam arti semua faktor diperhitungkan secara cermat. Pada keadaan tertentu misalnya apabila si perencana kekuatan kurang luas pengalamannya dapat mengarah ke proses perencanaan yang terlampaui hati-hati, terlampaui rumit sehingga pada akhirnya sering terjebak dalam hal-hal yang terlampaui, teknis dan bersifat segera (*immediate*) bahkan mengabaikan tuntutan yang lebih luas, vital dan berjangka panjang (*future*).

Kerangka Kerja Perencanaan Kekuatan (*Force Planning Frame Work*)

Jenderal Andre Beaufre mengatakan bahwa masalah yang paling sulit untuk dipecahkan adalah bagaimana membangun sistem Hankam semurah mungkin pada masa damai, namun kemampuannya dapat secepat mungkin ditransformasikan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan apabila terjadi keadaan krisis (bila ada agresi dari luar). Berdasarkan pendekatan di atas, kebutuhan penyiapan kemampuan Hankam yang memadai memerlukan adanya satu ke-

rangka kerja (*Frame Work*) yang dapat menampung serta menggambarkan faktor-faktor penting apa saja yang layak diperhitungkan dalam merencanakan kekuatan masa datang (*future force planning*).

Dalam bahasa yang paling sederhana dan lugas perencanaan kekuatan pada dasarnya berkaitan dengan tiga makna mendasar yaitu:

1. Pilihan strategik (*strategic choices*) yang membahas bagaimana menganalisis ancaman, tujuan dan kepentingan Hankam, sumber daya yang tersedia serta formulasi strateginya.

2. Pilihan kekuatan (*force choices*) yang membahas perkiraan kebutuhan kekuatan untuk menghadapi ancaman sesuai formulasi strategi di atas, kekuatan yang telah ada, kekurangan kekuatan, anggaran pembangunan yang dapat disediakan setelah itu dibuatlah rencana bagaimana membangun kekuatannya.

3. Pilihan penggunaan kekuatan (*force employment choices*) yang membahas bagaimana implementasi kekuatan yang telah dibangun, dikerahkan berdasarkan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai sasaran ruang dan waktu yang sepadan dengan strategi di atas.

Lebih lanjut ketiga makna mendasar tersebut harus dapat

teruji oleh jawaban dari enam pertanyaan di bawah ini yaitu: apakah kekuatan yang direncanakan (*future force to be planned*) telah *well designed, well organized, well equipped, well trained, well employed, well sustained and well supported*.

Di satu sisi perencanaan kekuatan dimensinya cukup luas (ruang, waktu, dan sasaran) di sisi lainnya derajat ketidakpastian masa datang cukup tinggi serta pembangunan alat utama, sistem senjata (Alut Sista) seperti tank-tank tempur, kapal perang, pesawat tempur membutuhkan waktu yang relatif panjang (sekitar 5-20 tahun), maka proses perencanaan kekuatan haruslah fleksibel. Oleh karena itu di dalam perencanaan kekuatan dikenal perencanaan yang bergulir (*rolling plan*). Artinya setiap dokumen perencanaan kekuatan (baik jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek) selalu dievaluasi dan direvisi agar substansi perencanaannya tetap relevan dan mutakhir.

Perencanaan bergulir memang dapat menjamin fleksibilitasnya, namun kadang-kadang perencanaan bergulir dapat menjebak perencana yang pesimistik ke dalam situasi "tidak taat azas". Derajat perubahan demikian besarnya sehingga kadang-kadang mengaburkan

arti dari konsistensi, kontinuitas dan konsekuensi dari arah dan tujuan perencanaan kekuatan itu sendiri.

Perencanaan bergulir yang baik hendaknya tetap berpegang pada visi dan misi organisasi Hankam untuk kurun waktu 25 tahun ke depan (jangka panjang). Fleksibilitas perencanaan hendaknya diterjemahkan menjadi keleluasaan dalam menentukan pilihan prioritas dan seleksi, terhadap sasaran pembangunan Hankam dan cara serta pentahapan upaya untuk mencapainya tanpa harus mengorbankan visi dan misi di atas. Agar perencanaan dapat menjamin amanat 6K (kontekstual, konseptual, konsekuen, kontinyu, konsisten serta konkrit) di bawah ini adalah contoh *force planning framework* yang dianut oleh Amerika Serikat (bagan 1) sebagaimana ditulis oleh Prof. Richmond M. Lloyd dan Letnan Kolonel (USAF) Dino A Lorenzinni dalam bukunya *A Framework for Choosing Defense Forces*.

Apabila kita pelajari *framework* di atas, maka untuk merumuskan strategi nasional (meliputi aspek politik, ekonomi dan Hankam) dimasukkan pertimbangan-pertimbangan: kepentingan dan tujuan nasional (meliputi aspek politik, ekonomi dan Hankam), teknologi.

Keterbatasan sumber daya,

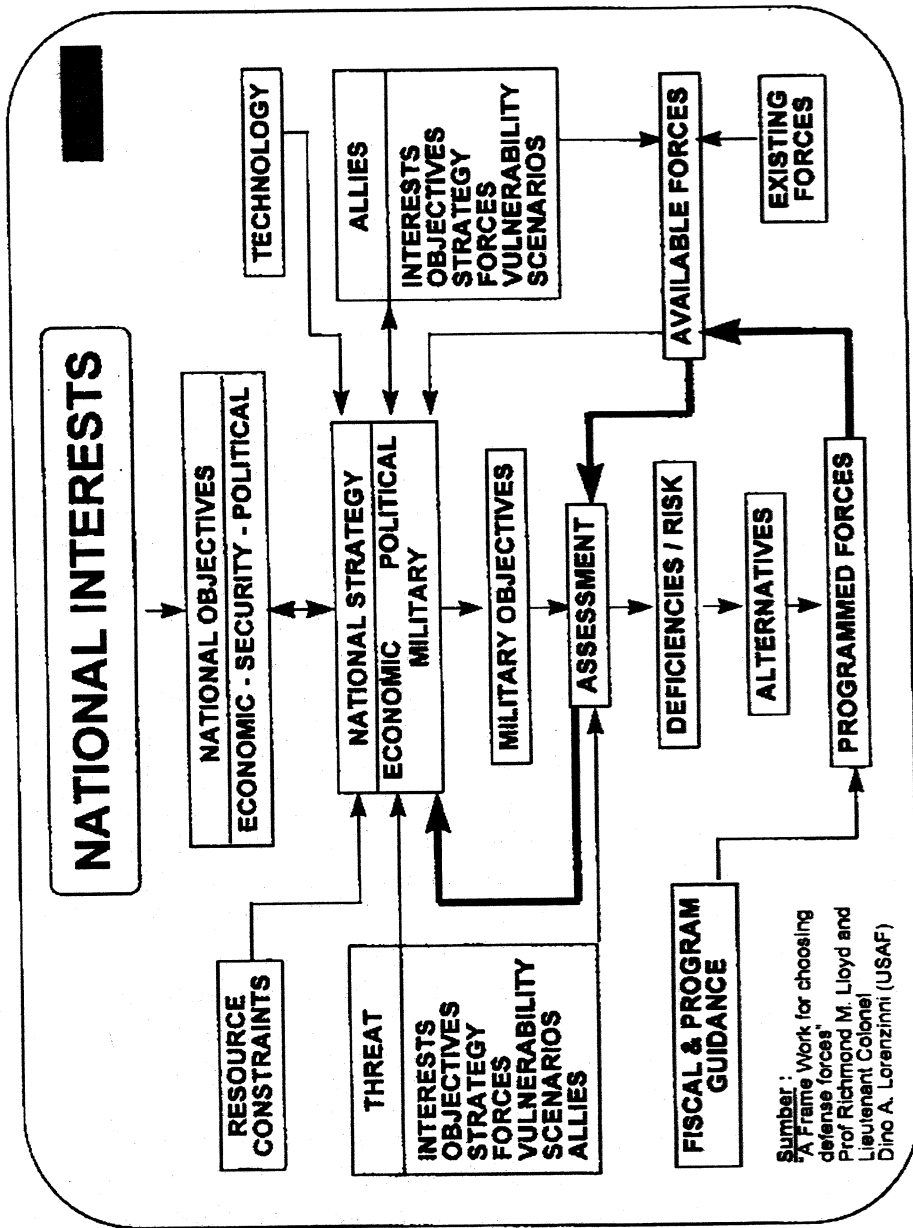
kekuatan yang dapat digunakan dan Sekutu, keseluruhannya dirumuskan guna menghadapi ancaman yang diperkirakan akan terjadi pada akhir masa perencanaan.

Selanjutnya proses analisis untuk mendukung perencanaan kekuatan Hankam memperhatikan pertimbangan:

1. Tujuan Hankam merupakan penjabaran dari strategi nasional aspek Hankam

2. Kekuatan yang dapat digunakan (*available forces*) yaitu sejumlah kekuatan yang siap dan siaga merupakan himpunan dari kekuatan yang ada (*existing force*) dan tambahan kekuatan dari sekutu serta kekuatan yang berhasil dibangun pada proses perencanaan kekuatan periode sebelumnya. Pada kenyataannya *existing force* tidak dapat disiap-siagakan seluruhnya, misalnya karena alasan biaya penyiapan terlampau tinggi, teknologi sudah kadaluwarsa atau karena kelangkaan suku cadang/dukungan sumber daya (logistik) dan atau kekuatan yang sudah diprogramkan pada perencanaan pembangunan periode sebelumnya belum selesai (ingat membangun Alut Sista perlu waktu yang relatif lama).

3. Ancaman yang diperkirakan akan dihadapi yaitu ancaman masa datang yang harus dihadapi oleh seluruh kekuatan



baik dari hasil pembangunan maupun kekuatan yang telah ada.

Ketiga faktor di atas setelah dihitung menurut pola pelibatan kekuatan (*wargaming*) sesuai strategi dan tujuan yang ditetapkan menghasilkan kebutuhan kekuatan tertentu (Kb). Apabila ternyata Kb ini lebih besar dari *available force* (Ka) akan terdapat kekurangan (*deficiencies*) yaitu sebesar (KbKa). Harga *deficiencies* inilah yang menjadi pendorong untuk menentukan alternatif pembangunannya dalam wujud *programmed forces*. Apabila ternyata *programmed forces* ini tidak dapat "sepenuhnya" didukung oleh anggaran pembangunan maka harga kekurangan itulah yang akan menjadi risiko masa depan (*future risk*). Interdependensi faktor di atas terus-menerus akan dievaluasi, dihitung dan direvisi ke dalam perencanaan bergulir (istilah umumnya *re-planning/rolling plan*).

Kerangka perencanaan kekuatan ini meskipun cukup sederhana, sudah cukup memberikan kejelasan pada perencana kekuatan untuk membuat perencanaan kekuatan masa depan, serta mempertimbangkan faktor-faktor dominan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).

Globalisasi dan Perencanaan kekuatan

Pada penghujung dekade delapan puluhan umat manusia disibukkan oleh gejala yang mencuat yaitu globalisasi. Apakah globalisasi merupakan fenomena akhir abad dua puluh. Ternyata tidak, globalisasi merupakan bagian dari proses sejarah yang panjang. Globalisasi telah mengalami enam tahapan proses yang berbeda, yaitu tahap embrio (abad 15-18), tahap pertumbuhan (abad 181/1870), tahap *take off* (1870-1920), tahap perjuangan hegemoni (1920 - 1960), tahap ketidakpastian (1960-1990) dan tahap kebudayaan global (setelah 1990).

Keenam tahapan di atas merupakan akibat dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi IPTEK itu sendiri telah menumbuhkan dua gejala penting yaitu "akselerasi" percepatan berkembangnya situasi baru dalam kehidupan masyarakat dunia dan "transiensi" yaitu meluasnya sifat kesementaraan masyarakat bangsa-bangsa. Revolusi IPTEK dengan segala manifestasinya mendorong meluasnya arus budaya global dengan ciri-ciri mobilitas tinggi dan nyaris tak terbendung antara lain berwujud:

1. Arus etnis ditandai oleh mobilitas manusia yang tinggi

baik dalam bentuk turis, imigran, pengungsi, tenaga kerja serta pendatang asing. Arus etnis ini telah mampu menggoncang komunitas sosial yang ada pada wilayah-wilayah yang dilalui arus etnis ini.

2. Arus teknologi ditandai oleh mobilitas teknologi, lahirnya *multi national corporation* (MNC) dan *transnational corporation*, kegiatannya dapat menembus batas fisik antarnegara.

3. Arus keuangan ditandai oleh semakin berkembangnya mobilitas modal, produk industri berteknologi tinggi serta membentuk struktur ekonomi super simbolik.

4. Arus media ditandai oleh semakin kuatnya mobilitas informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Lahir tata dunia baru dan tata ekonomi dunia baru sebagai reaksi terhadap konsep dunia riil dan dunia imajiner.

5. Arus idea ditandai semakin deras pengaruh nilai baru terutama merebaknya media elektronik khususnya internet. Semakin gencar isu hak azasi manusia, kebebasan transparansi, demokratisasi, pelestarian lingkungan hidup, keseluruhannya mengacu pada nilai universal.

Kita tak dapat mengingkari gejala ini dengan cara mengisolasi diri, karena batas fisik negara seolah telah rapuh, kehidupan

masyarakat menjadi rentan terhadap serbuan berbagai informasi dan nilai baru. Interelasi dan interdependensi persoalan dalam negeri dan luar negeri suatu bangsa telah menjadi semakin rumit dan majemuk. Persoalan dalam negeri suatu negara terutama bila menyangkut isu HAM, demokratisasi, transparansi, pelestarian lingkungan hidup tidak dapat lagi diselesaikan oleh kekuatan internal negara bersangkutan. Campur tangan dunia internasional selalu menyertai penyelesaian masalah dalam negeri, bahkan dapat berbentuk paksaan.

Globalisasi secara fisik memang telah melahirkan tuntutan akan peningkatan kualitas hidup manusia melalui manifestasi IP-TEK dan ekonomi, meskipun persepsi, cara pelaksanaan serta pendekatannya mungkin berbeda-beda. Pada kenyataannya globalisasi tidak secara otomatis mampu menyejahterakan umat manusia, bahkan tidak jarang melahirkan kerawanan baru bagi negara tertentu, terutama negara sedang berkembang.

Fakta di atas menunjukkan bahwa teori kedaulatan negara menjadi semakin rapuh terutama dalam mengendalikan masalah dalam negeri. Kekuatan dan kedaulatan negara semakin longgar karena pengaruh teknologi dan ekonomi. Uang dapat

mengalir tanpa hambatan melalui jaringan telepon, satelit, komputer atau lewat *digital cash*. Perdagangan *IQ capital* melalui pemanfaatan teknologi dapat dengan mudah melintas batas negara bahkan tanpa melalui pejabat imigrasi.

Dunia saat ini tengah mengalami perkembangan sistem internasional menjadi sistem global yang terbuka. Tak ada satu pun wilayah yang mampu menutup diri dari serbuan nilai baru, baik melalui jaringan ekonomi, informasi maupun transportasi. Derajat interaksi, interelasi dan interdependensi antarindividu, semakin intens. Dalam sistem global yang terbuka seperti itu tampil aktor-aktor baru yang pada abad lalu belum dikenal antara lain aktor teritorial nonnegara (seperti PLO), aktor nonteritorial transnational dan multinational, *intergovernmental organization* (IGO) dan *Non governmental Organization* (NGO). Sistem global secara pasti telah menekan arti penting pemerintah dan negara, di sisi lain meningkatkan arti penting peran nonpemerintah dan non negara. Sistem global yang terbuka tersebut ternyata amat sarat dengan kompleksitas masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

Pada aspek politik seolah-olah hanya ada satu konsep demokrasi, hak asasi manusia, transpa-

ransi yang diberlakukan secara universal. Pada era ini konsep-konsep lokal yang tak sesuai dengan konsep universal akan digilas tanpa belas.

Pada aspek ekonomi dunia mengalami perubahan revolusioner. Dalam 50 tahun terakhir, perubahan yang paling besar dan menyeluruh adalah munculnya pasar global dan pesaing global yang secara mantap menggantikan pesaing lokal.

Pada aspek sosial budaya dinamika pergaulan antarbangsa telah membentuk masyarakat global dengan ciri kehidupan yang dibentuk dengan pola pergaulan pola makan, pola busana yang berstandar universal. Nilai-nilai lokal nasional semakin terdesak oleh nilai-nilai global.

Pada aspek Hankam meskipun prinsip lama tentang Hankam telah berlalu namun aktualisasinya lebih diarahkan kepada keamanan manusia baik sebagai individu maupun anggota kelompok tertentu. Bila pada prinsip lama konsep keamanan dibangun atas pilar keamanan teritorial, kewibawaan pemerintah, identitas dan integritas bangsa, maka di masa depan, ada kecenderungan keamanan kelompok tertentu diupayakan secara eksklusif, melepaskan diri dari upaya keamanan yang dilakukan oleh pemerintah. Menghadapi gejala di atas, sudah barang

tentu pertimbangan-pertimbangan utama dan implementasi strategi Hankam harus diadakan penyesuaian meskipun tidak selalu harus meninggalkan prinsip dasarnya.

Selanjutnya apabila kita menggunakan model perencanaan kekuatan versi Lloyd dan Lorenzinni seperti yang telah dikemukakan terdahulu maka pada era globalisasi dengan segala aspeknya berpengaruh besar terhadap analisis ancaman (*threat*). Interelasi dan interdependensi antara lingkungan strategik yang diwarnai oleh globalisasi dengan tujuan, dan kepentingan Hankam akan menghasilkan berbagai probabilitas kerawanan terhadap jaminan keamanan dan rasa aman.

Beberapa kemungkinan kejadian yang berujung pada gangguan terhadap keamanan dan rasa aman dikemukakan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam risalahnya berjudul *Changing Concepts of Security* tahun 1997, antara lain disebut sebagai *the source of instability and security* meliputi: kekerasan etnis (*ethnic violence*), kekerasan sosial (*social violence*), konflik dengan kekerasan antar-kelompok masyarakat (*communal conflict*), terorisme, subversi-infiltrasi, gerakan migrasi penduduk (*migratory movement*), perpindahan penduduk (*mass po-*

pulation displacement), kejahatan dan kejahatan terorganisir (*organized crime*), pengangguran (*unemployment*), peredaran/perdagangan gelap obat terlarang (*drug smuggling and trafficking*), perusakan lingkungan hidup dan lingkungan hidup yang tidak sehat (*environmental destruction and unhealthy environment*), kemelaratan dan hidup tanpa harapan (*life without hope and poverty*), kompleksitas sentimen antar ras, etnis, suku, agama, budaya yang menimbulkan kecacauan sosial, gangguan ketertiban sosial, kekerasan sosial (*a complex of sentiment, social disorder, social turmoill, relegion*), pilihan pengambilan keputusan nasional yang menimbulkan gangguan sosial (*Human made due to the wrong policy choices*), musibah/bencana alam nasional (*national disaster*), instabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, kejahatan teknologi dan pembobol komputer (*technological frand and computer hacker*), penyakit-penyakit baru yang belum ditemukan penangkal dan obat penyembuhannya.

Pada tingkat/kadar yang lebih tinggi, *insecurity* dan *instability* di atas dapat mengarah menjadi kondisi: insiden bersenjata dan konflik bersenjata (*incident and armed conflict*), perang saudara (*civil war/abnommal law*), peperangan (politik, ekonomi,

sosial budaya) yang menggunakan metode perang (*warfare based on war*), dan perang (terbatas).

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa era globalisasi di satu sisi mendesak kebelakang "instabilitas dan insekuritas" yang kadarnya tinggi sedang di sisi lain memperluas spektrum instabilitas dan insekuritas di atas ke dalam berbagai bentuk yang lebih rumit, lebih sering terjadi dan lebih sulit penanganannya. Mengapa demikian? Salah satu motif pendorongnya antara lain adalah bergesernya konsep sekuriti yang bermula berorientasi pada keamanan wilayah, keamanan negara bergeser ke konsep sekuriti yang berorientasi pada keamanan individu (*human security*) sebagai manifestasi dari gelombang HAM, demokratisasi dan transparansi. Di masa depan perhatian dunia akan lebih tertuju kepada masalah perlindungan keamanan individu (tidak peduli individu tersebut berstatus warga negara apa dan berada di negara mana) ketimbang keamanan wilayah (*territorial security*).

Di masa depan terutama manakalah gelombang globalisasi semakin intens, maka para perencana kekuatan tidak lagi berorientasi kepada pembangunan kekuatan yang non konvensional (baca nuklir), karena barang siapa mengintrodusir kekuatan

nuklir, dengan serta merta akan mendapat reaksi negatif dari masyarakat dunia (contoh konkrit reaksi dunia terhadap percobaan nuklir India dan Pakistan baru-baru ini).

Secara umum era globalisasi telah menurunkan derajat perencanaan kekuatan yang semula berorientasi pada kekuatan yang besar dan mengarah pada perlombaan senjata, bergeser ke perencanaan kekuatan yang lebih wajar yaitu kekuatan yang cukup untuk menjamin keamanan dalam negeri. Sedangkan masalah-masalah keamanan regional dan keamanan internasional, kecenderungannya diselesaikan melalui forum-forum keamanan regional dan keamanan internasional.

Bagaimana Perencanaan Kekuatan di Indonesia

Perencanaan kekuatan Hankamneg RI selain mengacu pada GBHN maka mekanisme, prosedur dan jangka waktu perencanaan kekuatannya diatur berdasarkan Petunjuk Sistem Perencanaan Strategis Hankamneg sesuai Keputusan Menhankam Nomor: Kep/06/XII/1997.

Perencanaan kekuatan Hankamneg secara garis besar dilaksanakan melalui "Tiga Strata Kegiatan" yaitu:

1. Perumusan Strategi. Peru-

musan ini merupakan tingkatan yang mendasari segenap upaya pertahanan keamanan negara, berfungsi merumuskan strategi dan postur pertahanan keamanan negara, atas dasar politik dan strategi nasional yang ditetapkan dalam Garisgaris Besar Haluan Negara.

2. **Penyiapan Kekuatan.** Tingkat ini berfungsi merumuskan rencana pembinaan dan pembangunan kekuatan pertahanan keamanan negara untuk masa lima tahun, meliputi kegiatan-kegiatan: (a) analisis tentang ancaman yang dipersepsikan termasuk kemampuan dan posturnya, (b) analisis kemampuan dan postur yang dimiliki untuk dihadapkan pada persepsi ancaman tersebut di atas, (c) rencana pembinaan dan pembangunan kekuatan dalam 5 tahun termasuk rencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan postur yang telah dimiliki.

3. **Penggunaan Kekuatan.** Tingkat ini berfungsi untuk menyediakan dan mengendalikan penggunaan kekuatan yang dapat disiapkan, agar setiap saat dapat diproyeksikan secara cepat dan tepat ke setiap titik rawan di seluruh penjuru dan di luar tanah air apabila memang diperlukan (*pre-emptive strike*).

Selanjutnya ditinjau dari jangka waktu perencanaan do-

kumen-dokumen Renstra dikelompokkan ke dalam: (a) **Perencanaan Jangka Panjang.** Perencanaan strategik jangka panjang ditujukan untuk merumuskan arah kebijaksanaan dan strategi tingkat tinggi yang menetapkan tujuan dan cara pencapaian tujuan, serta kebutuhan kemampuan dan tingkat kekuatan yang dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk strategi dan postur pertahanan keamanan negara. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun dokumen jangka sedang dan jangka pendek di jajaran Dephankam dan ABRI. Perencanaan strategik jangka panjang meliputi kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun, dengan titik berat perkiraan pada kurun waktu lima tahun pertama, (b) **Perencanaan Jangka Sedang.** Perencanaan strategik jangka sedang merupakan kebijaksanaan dan strategi pengembangan kemampuan dan pencapaian sasaran pembangunan kekuatan Hankamneg. Perencanaan ini menjadi pedoman dalam menyusun rencana kebutuhan kekuatan ABRI (Renbutkuat ABRI) dalam rangka menghadapi dan mengatasi berbagai macam perkiraan peperangan (Yudha) yang mungkin dihadapi. Dokumen ini disusun dengan mempedomani arah GBHN, politik dan

strategi pertahanan keamanan negara, analisis sumber daya dan anggaran yang dapat mendukung pencapaian sasaran strategik Hankamneg. Dokumen jangka sedang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun berbagai dokumen yang pada akhirnya dapat menggambarkan program-program pembangunan kekuatan Hankamneg. Perencanaan jangka sedang meliputi kurun waktu lima tahun ke depan.

Perencanaan Jangka Pendek. Perencanaan strategik jangka pendek merupakan proses penyusunan program dan anggaran, sebagai jabaran dari program pembangunan jangka sedang. Tiap program berisikan gambaran mengenai sasaran dan prioritas yang ingin dicapai, kebutuhan sumber daya personil, material dan anggaran. Perencanaan strategik jangka pendek meliputi kurun waktu 1-2 (satu-dua) tahun.

Selanjutnya substansi untuk mengisi dokumen Renstra Hankamneg RI, dirumuskan berdasarkan paradigma berpikir sebagaimana dituangkan dalam *Force Planning Frame Work* Versi Lloyd & Lorenzinni. Perbedaan yang mendasar adalah tidak diintrodukirnya Allied (sekutu) dalam perencanaan kekuatan Hankamneg RI.

Dihadapkan pada era globa-

lisasi saat ini, terutama sekali dengan adanya krisis moneter yang melanda belahan bumi Asia dan sekitarnya, sudah barang tentu berpengaruh pula terhadap pembiayaan pembangunan Hankamneg RI.

Kebijaksanaan ekonomi makro selama Pelita VI yang diterapkan Pemerintah RI meliputi kebijaksanaan fiskal, moneter, neraca pembayaran serta kebijaksanaan di sektor riil, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi dan neraca transaksi berjalan serta untuk mencapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun ketiga Repelita VI memperlihatkan perkembangan yang cukup mantap. Laju perkembangan ekonomi selama periode 1993-1996 berturut-turut adalah 7,3%; 7,5%; 8,2% dan 8,0%. Namun menginjak tahun keempat sampai dengan tahun kelima Repelita VI dengan adanya krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta krisis moral maka pertumbuhan ekonomi terus menurun drastis dan bahkan pertumbuhannya menjadi negatif. Kebijakan ekonomi makro yang selama ini cukup baik sudah tidak mampu lagi mengatasi krisis ekonomi yang semakin memprihatinkan.

Upaya memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melalui berbagai upaya antara lain menaikkan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) juga kurang membawa hasil sebagaimana yang diharapkan bahkan mengakibatkan sektor industri yang mengandalkan modal dari dalam negeri, sebagian besar tidak mampu lagi mengambil kredit karena bunganya sangat tinggi.

Penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan dapat dipastikan akan menurun sehingga kemampuan untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan di bidang Hankam juga akan mengalami penurunan. Di lain pihak pemerintah membutuhkan dana yang tidak kecil untuk mewujudkan tuntutan reformasi serta untuk merehabilitasi sarana dan prasarana perdagangan yang dirusak oleh perusuh dan pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Oleh sebab itu sasaran pembangunan lima tahun ke depan termasuk pembangunan di bidang Hankam, perlu diadakan revisi/reprogram disesuaikan dengan tuntutan reformasi.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan di bidang Hankam pada Repelita VII agar konsistensi arah dan tujuan dapat terjamin dan merupakan pe-

ningkatan dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada Pelita sebelumnya, perlu diambil langkah-langkah antisipatif ke depan untuk melanjutkan pembangunan Hankamneg antara lain dengan memperkirakan APBN bidang Hankam pada Pelita VII.

Walaupun saat ini krisis ekonomi masih belum pulih, namun dengan adanya berbagai langkah-langkah yang akan dan sedang ditempuh Pemerintah, Dephankam/ABRI optimis krisis ekonomi secara berangsur-angsur akan segera dapat diatasi meski masih memerlukan cukup waktu.

Apabila perkiraan dukungan APBN bidang Hankam pada Pelita VII pada tiap tahunnya diperhitungkan berdasarkan data rata-rata persentase dukungan anggaran Hankamneg dan RAPBN selama 5 (lima) tahun sebelumnya, maka perkiraan dukungan anggaran sektor Hankamneg diperoleh sebagai berikut:

1. Untuk "proyeksi rendah", diambil dari rata-rata kenaikan/penurunan dukungan anggaran sektor Hankamneg selama 5 (lima) tahun berkisar $\pm 10,8\%$.

2. Untuk "proyeksi wajar", diambil dari rata-rata kenaikan APBN selama 5 (lima) tahun berkisar $\pm 15,52\%$.

3. Untuk "proyeksi tinggi", merupakan penjumlahan dari

proyeksi rendah dengan proyeksi wajar berkisar $\pm 26,32\%$.

Perhitungan tersebut di atas adalah merupakan perhitungan normatif tanpa memperhitungkan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Berdasarkan pengalaman TA 1997/1998 dukungan alokasi anggaran Dephankam/ABRI Sektor Hankamneg yang dijadualkan ulang sebesar $\pm 15,0\%$ dan TA 1998/1999 rencananya akan dijadualkan ulang sebesar $\pm 25,0\%$.

Berangkat dari kenyataan di atas dan mencermati krisis ekonomi yang masih sulit diatasi perkiraan dukungan anggaran bagi Dephankam/ABRI ke depan sangat mungkin tidak sesuai dengan perhitungan normatif di atas, artinya dukungan anggaran bagi Dephankam/ABRI tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun demikian guna dapat memperkirakan proyeksi dukungan anggaran Hankamneg pada Pelita VII, realisasi dukungan anggaran selama TA 1997/1998 dan TA 1998/1999 yang dijadual ulang dapat dijadikan acuan yaitu bahwa setiap proyeksi (rendah/wajar/tinggi) dikurangi/dipotong dengan persentase rata-rata anggaran yang dijadual ulang yaitu sebesar $\pm 20\%$.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa meskipun anggaran pembangunan cukup ber-

pengaruh dalam pembangunan bidang Hankam, namun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan, apalagi sistem Hankamneg RI penyelenggaraannya disandarkan kepada pen-dayagunaan seluruh potensi dan kekuatan komponennya menjadi Ratih - Linmas - ABRI dan pendukung dalam wadah Sishankamrata yang bersifat swakarsa, dinamik, kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan.

Pada konteks ini stabilitas dinamik akan tetap dapat terpelihara dengan baik apabila sendi-sendi penyelenggaraan Hankamneg RI seperti kebudayaan kesadaran bela negara, pembinaan teritorial, pembinaan kondisi sosial politik, pembinaan Siskamtibmas Swakarsa, peningkatan kemanunggalan ABRI - Rakyat terlaksana atas dasar semangat juang, cinta tanah air dan disiplin yang tinggi. Ruang, alat dan kondisi juang diyakini merupakan faktor penentu dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Hankamneg, namun demikian unsur manusia tetap merupakan faktor kunci.

Di tengah-tengah maraknya gelombang perubahan sebagai konsekuensi logis arus globalisasi maka pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai inti kekuatan Hankamneg RI tetap merupakan penentu pembangunan kekuatan

Hankam.

Mempertimbangkan dinamika kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, keterbatasan dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah serta tujuan dan kepentingan Hankamneg untuk 5 tahun ke depan maka pengembangan kemampuan pertahanan keamanan negara bertumpu pada pemeliharaan kemampuan yang telah dimiliki dan dititikberatkan pada peningkatan perangkat lunak dan keras, peningkatan latihan, peningkatan organisasi dan peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta pembangunan/pengadaan kekuatan personil dan alat sista yang sangat dibutuhkan untuk mengganti alat sista yang sudah usang (biaya pemeliharaan lebih besar dibanding nilai guna operasi) serta alat sista dengan teknologi relatif canggih untuk memelihara investasi kemampuan personil agar sejalan dengan kemajuan teknologi alat. Pengadaan kekuatan sifatnya bukan pengembangan secara drastis, namun karena benar-benar diperlukan.

Kebutuhan pembangunan kemampuan kekuatan komponen Hankamneg selalu dikaitkan dengan potensi sumberdaya nasional yang tersedia dan dihadapkan pada kemungkinan ancaman yang akan terjadi. Se-

hingga keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan anggaran yang tersedia, tingkat dukungan dan partisipasi seluruh rakyat serta derajat kesatuan visi para pengambil keputusan baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu implementasi upaya pembangunan Hankamneg harus dapat diperhitungkan secara nyata sesuai kebutuhan serta tersedianya anggaran yang dapat didayagunakan. Di samping itu pembangunan kemampuan Hankamneg harus dapat mendukung sasaran kemajuan yang akan dicapai di semua bidang, disesuaikan dengan arah dan strategi jangka panjang pembangunan nasional.

1. Sumberdaya Manusia

a. Kekuatan Ratih dan Linmas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kekuatan Hankamneg jangka panjang diperlukan kekuatan Ratih dan Linmas sebagai berikut: (1) ideal 3,5% dari jumlah penduduk, diambil dari warga negara yang berusia 18-55 tahun yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti wajib prabakti, (2) wajar 2,5% dari jumlah penduduk, diambil dari warga negara yang berusia 18-55 tahun yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti wajib prabakti, (3) minimal 1% dari jumlah penduduk diambil dari warga negara yang telah meng-

ikuti pendidikan bela negara seperti Kamra, Wanra, Satpam, Polsus dan Menwa.

b. Kekuatan ABRI dan Cadangan: (1) ideal 1% dari jumlah penduduk diambil dari warga negara yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kekuatan TNI diambil dari warga negara dan cadangan diambil dari purnawirawan yang memenuhi persyaratan, (2) wajar 0,50% dari jumlah penduduk diambil dari warga negara yang memenuhi persyaratan, (3) minimal 0,25% dari jumlah penduduk diambil dari warga negara yang memenuhi persyaratan, (4) khusus untuk Polri diperlukan kekuatan dengan *Police Population Ratio* (PPR) sebagai berikut: (a) ideal 1:750, b) wajar 1:850, (c) minimal 1:1000.

2. Sumber Daya Alam. Peningkatan kemampuan sumber daya alam dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan pemanfaatan sumber energi dan mineral, hutan dan tanaman pangan serta sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam yang ada diperbaharui untuk ditingkatkan produksinya sedangkan bagi sumber daya alam yang tidak dapat lagi diperbaharui diupayakan diversifikasi dan substitusi pengembangannya dalam upaya di samping untuk mendukung terwujudnya logistik

wilayah dan bahan cadangan materiil strategis juga untuk meningkatkan kemampuan produksi nasional secara merata sehingga dapat mendukung kepentingan pertahanan keamanan negara. Upaya peningkatan antara lain dilakukan melalui koordinasi serta kerjasama pembinaan dengan departemen-departemen lain yang terlibat dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Sumber Daya Buatan

Peningkatan sumber daya buatan dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan kapasitas dan peningkatan pemanfaatan pembangkit tenaga listrik, bendungan dan lain-lain bekerjasama dengan instansi yang terkait.

Kekuatan pendukung sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana yang diwujudkan menjadi sistem logistik wilayah serta cadangan materiil strategis, komposisi kekuatan dan pengerahannya sebagai berikut:

a. Sistem Logistik Wilayah: (1) ideal mampu mendukung kegiatan selama 3 bulan, (2) wajar: mampu mendukung kegiatan selama 3 minggu dengan fasilitas daur ulang dukungan logistik yang berlanjut, (3) minimal: mampu mendukung kegiatan selama 1 minggu (7 hari) dengan

siklus daur ulang dukungan logistik yang berlanjut.

b. Cadangan Material Strategis: (1) ideal dapat dikerahkan untuk mendukung ABRI dalam mengatasi 4 (empat) daerah rawan strategis dalam waktu yang bersamaan, (2) wajar dapat dikerahkan untuk mendukung ABRI dalam mengatasi 3 (tiga) daerah rawan strategis dalam waktu yang bersamaan, (3) minimal dapat dikerahkan untuk mendukung ABRI dalam mengatasi 2 (dua) daerah rawan strategis dalam waktu yang bersamaan.

4. Wilayah Negara

Peningkatan pemanfaatan ruang wilayah negara dilakukan melalui penataan ruang wilayah pertahanan keamanan negara secara serasi dengan unsur/instansi lain yang terlibat dalam penataan ruang dalam lingkup wadah tata ruang wilayah nasional. Tata ruang wilayah pertahanan keamanan negara mencakup wilayah pertahanan darat, laut dan dirgantara mulai dari tingkat nasional (RUTR Wilhannas) sampai dengan tingkat kabupaten/kodya (RUTR Wilhan Kodim).

Iptek dan Industri Hankam

Peningkatan Iptek dan industri Hankam dilakukan melalui kerjasama Litbang dengan De-

partemen, Lembaga pemerintahan non departemen dan industri strategik serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sehingga dapat menunjang kebutuhan Hankamneg sesuai perkembangan Iptek.

6. Hukum dan Perundang-Undangan

Peningkatan hukum dan penundang-undangan dilakukan melalui upaya pembuatan Rancangan Undang-Undang yang dibutuhkan serta upaya untuk menggoalkan Rancangan Undang-Undang yang telah maju ke Sekretariat Negara dan DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses dan perlu untuk dilanjutkan adalah RUU Keselamatan Nasional, RUU Survei dan Pemetaan serta RUU Wilayah Negara.

7. Kerjasama Internasional

Peningkatan kerjasama internasional dilaksanakan melalui media hubungan diplomatik, peranan Atase Pertahanan, kegiatan seminar/lokakarya, tukar menukar siswa mancanegara dan kegiatan latihan bersama dalam upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan regional dan ketertiban dunia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Manajemen Hankam

Peningkatan kemampuan Manajemen Hankam dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penerapan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pertahanan keamanan negara. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melalui peningkatan perangkat lunak, pendidikan untuk meningkatkan kemampuan manajemen serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait.

Demikianlah tulisan tentang pembangunan kekuatan Hankamneg RI dalam era globalisasi baik secara teoritik maupun aplikasinya dalam Renstra Han-

kamneg RI. Secara umum perencanaan kekuatan Hankamneg RI dilaksanakan secara komprehensif integral, memperhatikan aspek sinergi komponen kekuatannya serta keterpaduan upaya baik lintas sektoral maupun lintas wilayah. Bagaimanapun kondisinya Ruang, alat dan kondisi juang yang solid tetap merupakan andalan kekuatan. Pada intinya merupakan prasarat terwujudnya ketahanan bidang Hankam. Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi setiap pihak yang ingin memahami lebih jauh dalam mempertebal kesadaran bela negara, dan mengembangkannya dalam proses perencanaan kekuatan yang lebih rinci.